

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, maka pemerintah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai wujud menjamin kesehatan kepada masyarakat, program JKN diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat yang dijamin oleh Program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat tersebut dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care) (Rosmanely, 2018).

Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 2 bagian yaitu: Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan yang di daftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas: pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (BPJS, 2017).

Ketentuan pembayaran premi diwajibkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Terjadinya tunggakan karena tidak adanya mental gotong royong dalam hal iuran. Ini dikarenakan kebanyakan peserta yang mendaftarkan diri di

BPJS Kesehatan adalah peserta dengan resiko sakit di depan mata. Seperti peserta yang butuh segera pengobatan kesehatan (riwayat penyakit) dengan biaya mahal. Peserta seperti ini antusias dalam mendaftarkan kepesertaan program BPJS tetapi setelah proses pengobatan kesehatan dilalui, peserta pun acuh terhadap kewajiban pembayaran iuran (Hunaepi, 2015).

Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Kepesertaan PBPU yang terus meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. (Fildzah, 2016).

Ketidakpatuhan dalam pembayaran premi lebih didominasi oleh peserta mandiri atau biasa disebut Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan juga peserta Bukan Pekerja (BP), hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dan komitmen terhadap kepesertaan sebagai filosofi BPJS Kesehatan sebagaimana tercantum dalam UU BPJS yaitu, kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Sistem pembayaran premi BPJS Kesehatan saat ini menuntut peserta BPJS Kesehatan lebih mandiri dan sadar terhadap kewajiban dalam pembayaran premi. Namun sikap tidak patuh terhadap pembayaran premi BPJS Kesehatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari peserta BPJS Kesehatan hal ini bisa jadi disebabkan karena lemahnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan hak tanggung jawab serta kewajiban yang dilakukan oleh peserta. Mekanisme proses kepesertaan hanya melalui proses administrasi saja baik yang secara manual maupun elektronik. Tidak ada mekanisme edukasi dan sosialisasi dalam proses kepesertaan (Aryani, 2013).

Timbulnya sikap tidak patuh berasal dari diri pribadi peserta. Awal munculnya sikap ketidakpatuhan ini sangat tergantung dari niat untuk tidak patuh terhadap peraturan atau kurangnya sosialisasi bahkan juga disebabkan tidak adanya tindakan penyelesaian yang mampu secara nyata dan besar pengaruhnya untuk

mengatasi masalah. Ketidakpatuhan ini juga bisa disebabkan adanya kesulitan dalam teknis pembayaran dimana outlet pembayaran yang terbatas dan sulit terjangkau serta model pembayaran elektronik yang belum familier dimasyarakat dan juga sistem pembayaran yang tidak terintegrasi dengan sistem pembayaran yang lain (Iriyani, 2009).

Menurut data dari website BPJS Kesehatan peserta JKN di Indonesia hingga bulan Juni 2022 berjumlah 241,79 juta jiwa. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan KC Kediri jumlah peserta PBI hingga bulan oktober 2022 sebanyak 155.539 jiwa sedangkan jumlah peserta PBPU sebanyak 23,636 jiwa. Di Kota Kediri terdapat 3 (tiga) Kecamatan yaitu, Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren. Peserta PBPU pada bulan Oktober 2022 sebanyak 9.125 jiwa. Sedangkan jumlah peserta PBPU BPJS Kesehatan di Kecamatan Mojoroto berjumlah 7.937 jiwa dan di Kecamatan Pesantren berjumlah 6.574 jiwa, selain itu yang mendaftarkan program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab) hingga bulan Juni sebanyak 685 peserta.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peserta JKN di Kota Kediri masih ada yang belum patuh dalam membayar iuran. Alasan peserta PBPU tidak rutin membayar karena penghasilan mereka tidak menentu, ATM sering offline, lama proses bayar, dan biaya iuran terlalu tinggi. Selain itu, ada persepsi bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan BPJS kurang maksimal. Ada pula alasan lainnya yaitu peserta merasa kalau dirinya tidak sakit ,uang mereka akan hilang begitu saja dan walaupun sakit cukup beli obat obat di warung.

Menurut Pratiwi (2015) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan keteraturan membayar iuran JKN yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, kemampuan dan kemauan membayar iuran, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN yang tidak patuh dalam membayar iuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan Pendapatan dan Persepsi Peserta PBPU Terhadap Kepatuhan Membayar Iuran JKN di Wilayah Kota Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Hubungan Pendapatan dan Persepsi Peserta PBPU Terhadap Kepatuhan Membayar Iuran JKN di Wilayah Kota Kediri.?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui informasi mendalam tentang hubungan pendapatan dan persepsi peserta PBPU terhadap kepatuhan membayar iuran JKN di wilayah Kota Kediri.

1.3.2 Tujuan Umum

Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui hubungan pendidikan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di wilayah Kota Kediri.
- b. Mengetahui hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di wilayah Kota Kediri.
- c. Mengetahui hubungan pendapatan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di wilayah Kota Kediri.
- d. Mengetahui hubungan pekerjaan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di wilayah Kota Kediri.
- e. Mengetahui hubungan persepsi terhadap kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU di wilayah Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai hubungan pendapatan dan persepsi peserta PBPU terhadap kepatuhan membayar iuran JKN di wilayah Kota Kediri..

b. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian lain yang berminat mengembangkan topik bahasan ini dan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai gambaran, masukan dan alternatif dalam kepatuhan membayar iuran pada peserta PBPU terutama di wilayah Kota Kediri.